



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Fungsi Legislasi DPR RI Tahun Ini Meningkat Tajam
Tanggal	: Kamis, 22 Desember 2022
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 5

Fungsi Legislasi DPR RI Tahun Ini Meningkat Tajam



Sepanjang tahun 2022 menjadi tahun tersibuk bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sekarang Januari hingga Desember para wakil rakyat ini telah berhasil merampungkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

Sejauh ini Indra Iskandar mengatakan produk legislasi itu berasal dari Komisi Panitia Khusus (Panus), Badan Legislasi (Balé), dan Badan Anggaran (Banggar). Dia memaparkan, DPR menyelaksa lebih dari 100 RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) oleh Panus pada 18 Januari. Selanjutnya DPR terus bekerja merancang dan mensahkan UU, hingga yang teranyar disahkan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Data Sekretaris DPR mencatat, RUU yang disahkan menjadi UU pada 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 13 UU, dan pada tahun 2022 sebanyak 34 UU. Menurut Indra jumlah tersebut sangat signifikan mengingat DPR sangat mendepankan kualitas daripada kuantitas.

Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023 sebanyak 39 RUU, dengan rincian 25 RUU diusulkan oleh DPR RI; 11 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD.

“Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah ditetapkan menjadi undang-undang adalah Undang-Undang KUHP. Negara kita sudah merdeka selama 77 tahun dan tidak kurang dari 59 tahun, tetapnya saja tahun 1963, sudah melakukan diskusi terhadap perubahan KUHP” kata Puan.

RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terhadap seluruh ketentuan pidana dan persamaan menghadapi Natal dan Tahun Baru

menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.

“Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis,” kata cucu Proklamator tersebut.

Puan juga mengatakan, DPR RI mengapresiasi capaian realisasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2022 yang menunjukkan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan global.

Puan memaparkan bahwa APBN Tahun Anggaran 2022 juga telah menunjukkan kinerja yang baik dan mampu membangun kinerja ekonomi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi walaupun Indonesia berada pada situasi global yang penuh gejolak.

“Dia mengingatkan Pemerintah harus terus mewaspada dan meningkatkan berbagai ketidakpastian dan risiko akibat tekanan dan risiko global maupun domestik yang terus bergerak dinamis.

DPR RI juga mengapresiasi telah diserahkan-pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian/lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kata Puan, selain pengawasan reguler yang menjadi urusan setiap alat kelengkapan dewan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, antara lain Kedudukan Luar Biasa (KLB) polio dan percepatan vaksinasi polio; permasalahan gaji ginal akut progresif atipikal; penanganan bencana alam akibat ekstrem; Penanganan bencana alam akibat cuaca ekstrem; dan, permasalahan guna Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian memberi perhatian juga kepada Persoalan blank spot saran televisi analog serta pengadaan dan pendistribusian Set Top Box (STB) yang belum tepat sasaran; Penanganan atau peneritian Over Dimension Over Load (ODOL) atau kelebihan dimensi-beban; dan, persamaan menghadapi Natal dan Tahun Baru

dan tingginya harga bahan makanan pokok menjelang akhir tahun 2023.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, memperkuat kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat,” kata Puan.

Kegiatan Diplomasi Parlemen:

1. Sidang Tahunan ke-30 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF-30) pada 26-29 Oktober 2022 di Bangkok.
2. Sidang APIA-ASEAN Interface at the 40th and 41st ASEAN Summits pada tanggal 7-11 November 2022, di Phnom Penh, Cambodia.
3. Sidang 27th Session of the conference of the parties of United nations Framework Convention on Climate Change (COP27) pada tanggal 11-15 November 2022 di Sharm El-Sheikh, Mesir.
4. Sidang Executive Committee of the League of Parliamentarians for Al Quds pada tanggal 17-21 November 2022 di Istanbul, Turki.
5. Sidang Umum ke-43 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (APIA) pada tanggal 20-25 November 2022, di Phnom Penh, Cambodia.



INDRA ISKANDAR
Sekretaris Jendral DPR

Keberhasilan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Mewujudkan Parlemen Modern

Setjen DPR RI telah menunjukkan bahwa meritokrasi di dalam kesejektifan berjalan dengan baik. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan penerapan meritokrasi ini melalui proses evaluasi semua karyawannya yang berlangsung secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan core values ASN yang ber-**AKHLAK**.

Secara keseluruhan keberhasilan setjen DPR RI tahun ini telah meraih 18 penghargaan. Penghargaan lain yang diperoleh Setjen DPR RI adalah mendapatkan anugrah meritokrasi (Pendian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari komisi aparatut Sipil Negara (KASN) dengan kategori sangat baik dengan poin 345,5 yang diterima pada 8 Desember lalu di Jakarta, sementara tahun sebelumnya hanya dengan 292 poin dengan kategori baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa meritokrasi di dalam kesejektifan berjalan dengan baik. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan penerapan meritokrasi ini melalui proses evaluasi semua karyawannya yang berlangsung secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan core values ASN yang ber-**AKHLAK**.

Secara keseluruhan keberhasilan setjen DPR RI tahun ini telah meraih 18 penghargaan

Daftar sebagian RUU yang disahkan oleh DPR RI di tahun 2022

- RUU tentang Ibu Kota Negara disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022
- RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022
- RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan disahkan menjadi UU pada 15 Februari 2022
- RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan disahkan menjadi UU pada 15 Februari 2022
- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan menjadi UU KUHP pada 6 Desember 2022
- RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU pada 12 April 2022
- RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022
- RUU tentang APBN Tahun 2022 disahkan menjadi UU pada 30 Sept 2021
- RUU tentang Provinsi Riau disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022
- RUU tentang Provinsi Jambi disahkan menjadi UU pada 30 Juni 2022

- diantaranya :
1. Sertifikat Indeks Keamanan Informasi dan Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Keamanan Siber dari BSN.
 2. Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDH) Terbaik II Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 3. Penghargaan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Pajak Tahun 2021.
 4. Perpustakaan DPR RI Raih Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
 5. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB, diberikan kepada Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran Biro Kerja sama antar Parlemen (BKSP) dan Pusdiklat.
 6. Penghargaan Juara III kegiatan Kesiapsiagaan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintah pusat dari BSN.
 7. Penghargaan Kualitas Pengisian Jabatan Pinjaman Tinggi (JPT) dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
 8. Peringkat tiga penghargaan BKN Award 2022 dengan kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, pada Non Kementerian Tipe Besar.
 9. Penghargaan Digital Transformation di Indonesia Awards 2022 kategori Excellent Public Service Digitalization Initiatives and Superintendent yang diberikan MNC Group.
 10. Penghargaan "Sonora Excellent Government Appreciation Award".
 11. Anugerah IPRAHUMAS 2022 kategori Pranata Humas, sub Kategori Pranata Humas Pertama.
 12. Penghargaan Bronze Winner dalam Ajang Public Relation Indonesia Awards 2022, untuk Pameian Daring "Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia".
 13. Penghargaan Jurnat Kategori "Utilisasi Barang Milik Negara" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 14. Anugerah Meritokrasi kriteria Sangat Memuaskan dengan nilai 344,45
 15. Anugerah penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informasi dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tahun 2022.
 16. Penghargaan sebagai Best Starter Survey Indeks BerAKHLAK (kolaboratif) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 17. Setjen DPR RI mendapatkan nilai A- atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari KemenPAN RB terhadap pelayanan dukungan persidangan kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan.
 18. Peringkat ke-2 Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja dari BKN.

□ **Adv/Aris Kurniawan**